

ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP RISIKO KEBANGKRUTAN

Disusun Oleh :

Andre Hananto Wibowo

*Program Studi Magister Manajemen
Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

J. Sukmawati Sukamulja

*Program Studi Magister Manajemen
Universitas Atma Jaya Yogyakarta*

s.sukmawati@yahoo.com

Abstract: *The purpose of this research is to analyze the influence of corporate governance implementation to bankruptcy risk. This research use 5 measurement of corporate governance implementation, such as : Corporate Governance Perception Index (CGPI) score, board size, proportion of independent commissioners, size of the audit committee, and proportion of audit committee expertise and Altman Z-Score as a measure of the bankruptcy risk. This research use firm size as a control variable measured by natural log of total assets owned by company. The samples used in this research is go-public companies on corporate governance reports by Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in the period 2010-2014. This research use secondary data, such as companies annual reports from idx.com, and Indonesia Capital Market Directory (ICMD). The method used in this research is linear regression. The result of this research examine that corporate governance factors such as CGPI score, board size, and proportion of audit committee expertise has influence on bankruptcy risk. Other findings of this research is proportion of independent commissioners and size of the audit committee has no influence on bankruptcy risk.*

Keywords: *Corporate Governance, Bankruptcy Risk, Firm Size*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari penerapan *corporate governance* terhadap risiko kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan 5 ukuran penerapan *corporate governance*, yakni : skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*), ukuran dewan perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan proporsi komite audit ahli dan Altman Z-Score sebagai ukuran dari risiko kebangkrutan perusahaan. Penelitian ini menggunakan *firm size* sebagai variabel kontrol yang diukur dengan *log natural* dari aset total perusahaan. Sampel yang diteliti adalah perusahaan – perusahaan go-public yang ada didalam laporan *corporate governance* yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) pada tahun 2010 – tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dan dilakukan dengan menggunakan regresi linier. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ukuran *corporate governance* khususnya skor CGPI, ukuran dewan perusahaan, dan proporsi komite audit ahli berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan. Hasil penelitian lainnya adalah proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Risiko Kebangkrutan, Firm Size*

Pendahuluan

Sebuah perusahaan yang baik, hendaknya ada proses, struktur, dan peraturan, dan sistem yang jelas, yang berperan untuk menggerakkan setiap kegiatan operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Berjalannya setiap kegiatan operasional perusahaan dengan baik akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, dimana keuntungan tersebut dapat digunakan untuk menyejahterakan baik karyawan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), ataupun pemilik modal dari perusahaan baik pemilik saham (*shareholders*) atau pemilik perusahaan (*owner*).

Proses, struktur, peraturan, dan sistem yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan menjadi prinsip dan penggerak setiap kegiatan operasional perusahaan. Proses, struktur, peraturan, dan sistem itulah yang akhir - akhir ini dikenal sebagai *corporate governance*. Gagal ataupun suksesnya sebuah perusahaan tidak bisa dipisahkan dari *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Penerapan *corporate governance* yang sukses mampu menghantarkan perusahaan menuju kesuksesan, begitu pula sebaliknya penerapan *corporate governance* yang gagal juga mampu menghantarkan perusahaan menuju kebangkrutan.

Apabila melihat dan memahami dengan seksama, banyak sekali penyebab yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan sampai akhirnya berujung pada kebangkrutan. Mulai dari penyebab yang paling mendasar, misalnya ketidakmampuan jajaran manajemen puncak (*Top Management*) dalam mengambil keputusan, penerapan keputusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan karena salah mengenali situasi yang terjadi, hingga penyebab yang bisa dikatakan tidak mendasar, seperti perusahaan yang salah menempatkan karyawan, serta perusahaan salah merekrut karyawan karena tidak berkompeten di bidangnya. Penyebab – penyebab yang bisa menyebabkan perusahaan mengalami kegagalan tersebut dapat dihindari apabila perusahaan mampu menerapkan prinsip *corporate governance* dengan baik.

Prinsip *corporate governance* akan berjalan dengan lancar apabila dimulai dari dalam perusahaan dengan benar dalam setiap kegiatan operasionalnya. Untuk seluruh perusahaan baik yang beroperasi di Indonesia maupun di negara – negara lain, prinsip *corporate governance* tidak bisa diabaikan lagi, dan memegang peranan yang sangat penting, banyak pakar dan para pengamat ahli menyampaikan bahwa kesuksesan sebuah perusahaan dalam menyejahterakan seluruh *stakeholders*-nya, baik internal maupun eksternal sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dan kegagalan penerapan prinsip *corporate governance*.

Melihat data yang diterbitkan oleh *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang menyampaikan tentang penilaian pelaksanaan *corporate governance* di negara – negara Asia terlihat bahwa pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia tertinggal cukup jauh. Penerapan *corporate governance* di Indonesia masih belum berjalan dengan baik hal itu dapat terlihat pada skor *corporate governance* yang didapat oleh Indonesia sangat rendah.

Sejak tahun 2010 Indonesia memiliki skor *corporate governance* yang rendah. Perkembangan *corporate governance* di Indonesia juga tidak memperlihatkan yang baik hal itu dapat diketahui dari skor *corporate governance* yang didapat oleh Indonesia cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan sejak tahun 2012 penerapan *corporate governance* di Indonesia menempati peringkat terbawah.

Penelitian ini akan menggunakan data dari *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang melakukan berbagai macam riset mengenai *corporate governance*. *Good corporate governance* amat diperlukan sebagai barometer akuntabilitas suatu perusahaan. Pengelolaan perusahaan amat penting untuk diperlukan karena tata kelola perusahaan yang baik berbanding lurus dengan tingkat ketidakpastian pengembalian investasi.

Penerapan prinsip *corporate governance* dalam perusahaan sangat penting dan merupakan kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa

apakah perusahaan yang memiliki prinsip penerapan *corporate governance* yang baik juga memiliki risiko kebangkrutan yang rendah, begitu pula dengan perusahaan yang menerapkan prinsip penerapan *corporate governance* yang masih buruk juga akan memiliki risiko kebangkrutan yang tinggi, dan mengidentifikasi hubungan antara setiap komponen – komponen yang ada pada prinsip *corporate governance* perusahaan terhadap risiko kebangkrutan perusahaan.

Bersumber dari penelitian McKinsey dan Company yang bekerjasama dengan *World Bank*, *Asia Development Bank* (ADB), dan Komite Nasional *Good Corporate Governance* yang dikemukakan dalam *Corporate Governance Investor Forum* di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2000 (Sukamulja, 2003) terlihat bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dari lima negara Asia yang diteliti dalam pelaksanaan GCG. *Issue* ini disebabkan lebih dari 75 persen responden menyatakan bahwa tidak serius pemerintah dan para pemegang kendali dalam menjalankan GCG.

Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa sebenarnya rata – rata para investor bersedia membayar 27 persen *premium* jika perusahaan – perusahaan di Indonesia menerapkan prinsip GCG. *Survey* memperlihatkan bahwa para investor bersedia memberikan *premium* masing – masing sebesar 20 persen untuk perusahaan Jepang dan Taiwan yang menerapkan GCG, 24 persen untuk Korea Selatan, 26 persen untuk Thailand, dan 25 persen untuk Malaysia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa selama Indonesia belum menerapkan prinsip GCG secara sungguh – sungguh, maka para investor asing tidak akan datang ke Indonesia.

Peneliti berharap untuk kedepannya dengan melihat hasil dari penelitian ini, perusahaan mengetahui posisi dan kontribusi dari prinsip *corporate governance* terhadap keberhasilan maupun risiko kebangkrutan perusahaan, dan perusahaan dapat menerapkan prinsip *corporate governance* secara lebih baik lagi agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap risiko kebangkrutan yang ditanggung oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear *corporate governance* terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan *firm size* sebagai variabel moderasi pada perusahaan-perusahaan terbuka (*go-public*) yang berada dalam laporan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG selama periode 2010 - 2014. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh antara penerapan prinsip *corporate governance* (*Skor Corporate Governance Perception Index, Board Size, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Proporsi Komite Audit Ahli*) dengan *firm size* sebagai variabel moderasi terhadap risiko kebangkrutan yang harus ditanggung oleh perusahaan ?

Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Corporate governance menjadi suatu bahasan yang sangat penting, karena pelaksanaan *corporate governance* merupakan penentu terbesar terhadap sukses atau tidaknya perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi seluruh pemangku kepentingannya. *Corporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan Bambang, 2007). Menurut FCGI terdapat pelaksanaan prinsip *corporate governance* secara internasional, dan prinsip tersebut mencakup hal – hal sebagai berikut : Hak dari pemegang saham, siapa yang harus diinformasikan dengan benar tentang sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan tepat pada waktunya, siapa yang berhak dan bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada perubahan perusahaan yang bersifat fundamental, dan siapa yang berhak menerima keuntungan dari perusahaan. Perlakuan yang adil bagi setiap pemegang saham, terutama pemegang saham dari negara lain / asing dan minoritas, dengan memberikan

informasi dan materi yang secara penuh kepada mereka. Peran dari setiap pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan dan perusahaan dengan keuangan yang baik. Pengungkapan yang akurat, tepat waktu, dan transparan yang berkaitan dengan seluruh materi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku kepentingannya, dan tanggung jawab dari dewan dalam manajemen perusahaan, pengawasan dan akuntabilitas dari manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham.

Menurut FCGI, pemerintah juga mengambil peranan penting bagi penerapan *corporate governance* bagi perusahaan, yakni pemerintah dapat berperan sebagai peran pendukung yang penting dengan menerbitkan dan memberlakukan regulasi yang memadai tentang pendaftaran perusahaan, pengungkapan data keuangan perusahaan dan aturan tentang tanggung jawab dari dewan komisaris dan jajaran direksi.

Perusahaan dengan tata kelola yang buruk akan dihindari dan dikucilkan dalam forum – forum nasional dan internasional. Tidak ada pengecualian bagi perusahaan dimanapun perusahaan tersebut berada tuntutan adanya GCG berlaku dimanapun juga.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006 terdapat lima (5) asas agar *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Asas yang pertama, yakni transparansi (*transparency*), perusahaan dalam menjalankan bisnis dan kegiatan operasionalnya harus menjaga dan mewujudkan keterbukaan informasi yang relevan dan mudah diakses bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), perusahaan juga harus menyampaikan informasi – informasi kepada setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan hak masing – masing. Informasi – informasi yang disediakan oleh perusahaan harus mencakup kondisi keuangan, strategi perusahaan, visi dan misi, sasaran usaha, serta pengendalian risiko dan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Asas kedua dalam prinsip *corporate governance*, yakni akuntabilitas (*accountability*), pada aspek ini perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya, sehingga perusahaan harus memiliki standar penilaian, ukuran kinerja yang jelas dan konsisten terhadap tanggung jawab dan rincian tugas setiap organ perusahaan. Perusahaan juga bisa memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku yang sesuai dengan visi, misi dan nilai – nilai perusahaan.

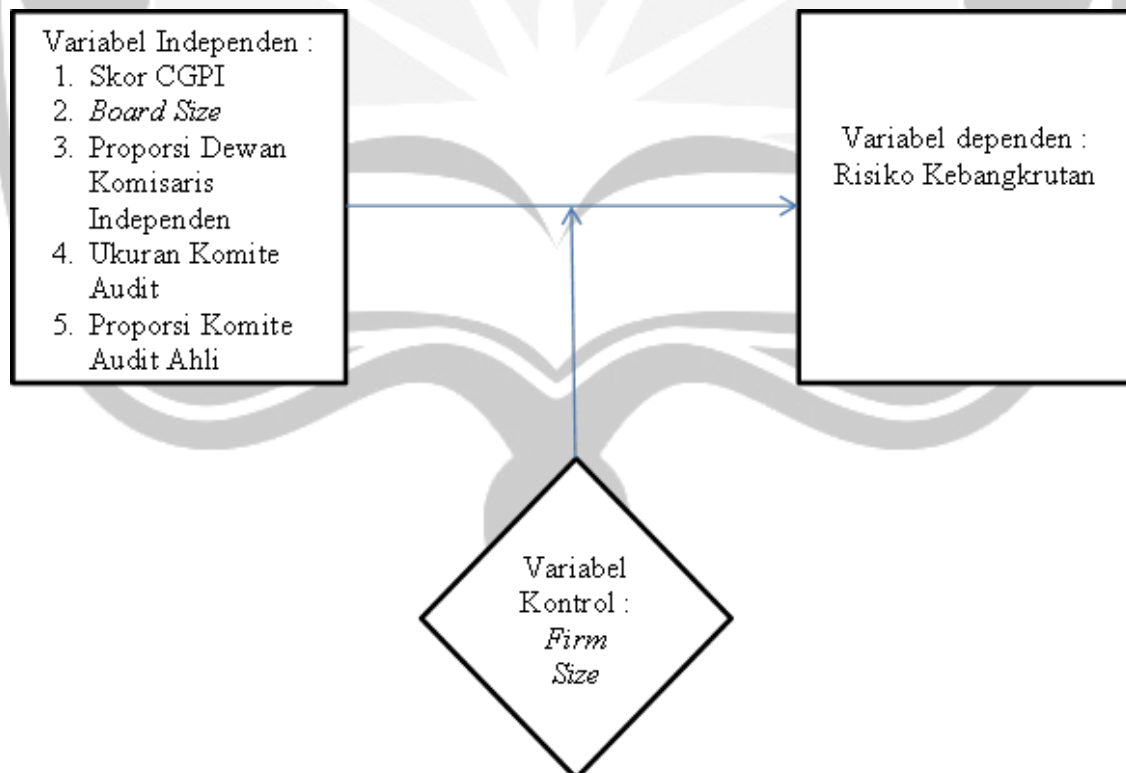
Asas ketiga dalam prinsip *corporate governance*, yakni pertanggungjawaban (*responsibilities*), pada aspek ini perusahaan harus mampu mematuhi seluruh peraturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang terhadap perusahaan. Perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab terhadap masyarakat berkaitan dengan pencemaran lingkungan tempat tinggal masyarakat yang disebabkan oleh dampak negatif dari seluruh kegiatan operasional perusahaan, misalnya: limbah dan polusi yang berasal dari perusahaan yang mencemari lingkungan.

Asas keempat dalam prinsip *corporate governance*, yakni independensi (*independency*), pada asas ini kebijakan dan keputusan yang diambil tidak boleh didominasi oleh salah satu pihak saja demi keuntungan pribadi. Perusahaan harus dikelola secara independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, sehingga perusahaan terhindar dari konflik kepentingan antar kelompok dari organ dalam perusahaan.

Asas kelima dalam prinsip *corporate governance*, yakni kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), pada prinsip ini perusahaan wajib memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara setara dan sesuai dengan hak dan kewajiban masing – masing. Perusahaan juga harus bisa menerima kritik dan saran dari seluruh pemangku kepentingan yang ditujukan bagi perusahaan demi berkembangnya perusahaan. Perusahaan tidak boleh menilai seluruh organ perusahaan dengan hanya mendasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik tetapi harus dinilai apakah mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar atau tidak.

Menurut FCGI terdapat empat (4) keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* dengan baik, yakni *easier to raise capital* dengan penerapan *corporate governance* yang baik dapat membuat investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. *Lower cost of capital* dengan penerapan *corporate governance* yang baik dapat mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*. *Improved business performance and improved economic performance* dengan penerapan *corporate governance* yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). *Good impact on share price* dengan penerapan *Corporate Governance* pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen, khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Menurut Sukamulja (2003) adanya *Good Corporate Governance* akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan pasar modal. Perusahaan membuat investor merasa aman dengan penerapan GCG yang selanjutnya akan berdampak investor akan berbondong – bondong untuk menanamkan modalnya di perusahaan, sehingga tingkat biaya modal perusahaan akan menurun karena perusahaan hanya menggunakan sedikit modal saja. Akibat rendahnya risiko yang harus ditanggung oleh semua pihak terhadap perusahaan dengan GCG akan menimbulkan produksi biaya rendah. Kebalikannya, perusahaan dengan tata kelola yang buruk mempunyai tingkat risiko yang tinggi sehingga harus mengeluarkan biaya modal yang lebih tinggi dari biaya modal rata – rata dan perusahaan bekerja dengan biaya produksi yang tinggi.



Kerangka Penelitian

Berdasarkan kepentingan, manfaat, dan tujuan penerapan *corporate governance* yang sangat baik bagi perusahaan yang telah diungkapkan pada latar belakang dan tinjauan pustaka, penelitian ini akan menganalisis apakah terdapat pengaruh dari komponen –

komponen yang ada dalam penerapan sistem *corporate governance* dengan risiko kebangkrutan. Untuk mengetahui penerapan sistem *corporate governance* peneliti menggunakan lima (5) macam variabel, yakni : skor CGPI, *board size*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan proporsi komite audit ahli sebagai pengukur atau *proxy* pelaksanaan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Peneliti juga menggunakan *firm size* sebagai variabel control untuk meneliti pengaruh antara penerapan *corporate governance* terhadap risiko kebangkrutan.

1. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) : CGPI merupakan skor yang akan digunakan sebagai ukuran tentang penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan, dimana merupakan total skor yang diberikan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). IICG memberikan skor masing – masing untuk setiap aspek (*Self assesment*, sistem dokumentasi, makalah, dan observasi) yang ada dalam *Corporate Governance* yang menyimbolkan baik buruknya pelaksanaan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh masing – masing perusahaan. Berdasarkan skor masing – masing pada setiap aspek tersebut dapat diketahui skor total CGPI yang dimiliki oleh perusahaan. Perbedaan skor CGPI mencerminkan perbedaan pelaksanaan *corporate governance* yang dilakukan oleh masing – masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan skor CGPI sebagai ukuran yang mencerminkan pelaksanaan *Corporate Governance* perusahaan secara keseluruhan. Maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh antara skor CGPI terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

2. *Board Size* : Ghazali (2010) juga menyatakan bahwa ukuran *board size* yang lebih besar membuat kinerja perusahaan yang lebih baik karena memiliki perbedaan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang kemudian didiskusikan dalam *board*. Penelitian yang dilakukan oleh Hussainey dan Alfijri pada tahun 2012 menyatakan bahwa salah satu mekanisme dari *corporate governance internal* perusahaan adalah *board size*, hal ini disebabkan karena *board of directors* bertanggungjawab untuk mengelola aktivitas perusahaan dan membuat keputusan strategik perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar pada tahun 2015, *board size* menjadi salah satu kunci ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur efektifitas struktur *corporate governance* dalam perusahaan. Mengikuti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hussainey dan Alfijri (2012) ukuran *board size* diukur dengan jumlah banyaknya anggota dewan perusahaan baik eksekutif (dewan direksi) maupun non-eksekutif (dewan komisaris). Eisenberg *et al.* (1998) dan Mak dan Kusnadi (2005) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dengan ukuran *board size* yang lebih besar menjadi perusahaan yang lebih *profitable* dan memiliki potensi kebangkrutan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan kecil. Guest (2009) menyatakan *board size* memiliki pengaruh negatif yang cukup kuat terhadap variabel kinerja perusahaan. Temuan tersebut mendukung pendapat bahwa masalah komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi permasalahan utama dalam keefektifan *board size* yang besar. Garg (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *board size* terhadap kinerja perusahaan.

H_2 : Terdapat pengaruh antara *board size* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

3. Proporsi Komisaris Independen : peneliti menggunakan variabel proporsi komisaris independen sebagai salah satu ukuran *corporate governance* menyesuaikan beberapa penelitian terdahulu. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Deviacita dan Tarmizi (2012) menggunakan variabel proporsi komisaris independen sebagai salah satu ukuran dari *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang

dilakukan oleh Wardhani (2007) yang menggunakan proporsi dewan komisaris independen sebagai variabel independen yang mengukur penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Irma *et al.* (2015) yang menggunakan proporsi dewan komisaris independen sebagai salah satu ukuran dalam *board of commissioner* yang menjadi variabel dari *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Ukuran proporsi dewan komisaris independen diukur dengan perbandingan jumlah antara banyaknya dewan komisaris independen terhadap jumlah total banyaknya anggota dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhao (2008) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *corporate governance* terhadap *financial distress* perusahaan, penelitian tersebut menggunakan variabel proporsi komisaris independen sebagai salah satu ukuran penerapan *corporate governance* perusahaan. Raharja (2014) menyatakan bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik dalam perusahaan. Wardhani (2007) menyatakan permasalahan dalam *corporate governance* adalah CEO yang lebih dominan dibandingkan dewan komisaris, sehingga untuk menyeimbangkannya dipengaruhi oleh independensi dari dewan komisaris. Triwahyuningtias dan Muharam (2012) menyatakan bahwa komisaris independen menjadi pihak eksternal yang independen agar keputusan yang diambil tepat dan menjauhkan perusahaan dari kesulitan keuangan. Pathan, *et al.* (2007) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara proporsi dari dewan direksi yang independen terhadap kinerja bank.

H₃ : Terdapat pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

4. Ukuran Komite Audit : peneliti menggunakan variabel ukuran komite audit sebagai salah satu ukuran *corporate governance* menyesuaikan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian Irma *et al.* (2015) komite audit merupakan sebuah komponen penting yang mendukung implementasi dari *good corporate governance*. Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam No: kep.29/PM/2004, komite audit merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan manajemen perusahaan, sehingga komite audit memiliki peran penting dalam penerapan *corporate governance* perusahaan. Penelitian Xie *et al.* (2003) menemukan bahwa komite audit merupakan faktor penting dalam manajemen pengendalian. Variabel ukuran komite audit diukur dengan jumlah banyaknya anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian Irma *et al.* (2015) menyatakan bahwa komite audit sebagai salah satu indikator *corporate governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Menurut Pembayun dan Januarti (2012) efektifitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite audit meningkat, dikarenakan komite memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk menangani masalah – masalah yang dihadapi oleh perusahaan, dan diharapkan keberadaan komite audit tersebut dapat menghindarkan perusahaan mengalami permasalahan keuangan. Sam'ani (2010) menjelaskan bahwa komite audit berperan dalam memastikan kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan. Fungsi komite audit yang efektif akan mengarah pada semakin baiknya fungsi kontrol sehingga konflik keagenan dapat diminimalisasi, dengan konflik keagenan yang dapat diminimalisasi maka kinerja perusahaan akan lebih baik. Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan dan pada akhirnya akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (Anderson *et al.*, 2004). Hapsoro (2008) serta Gil dan Obradovich (2012) yang menyatakan

terdapat hubungan positif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan. Romano *et al.* (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara jumlah komite audit dengan kinerja keuangan perusahaan.

H₄ : Terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

5. Proporsi Komite Audit Ahli : Penelitian yang dilakukan oleh Deviacita dan Tarmizi (2012) menggunakan keahlian komite audit sebagai salah satu ukuran dari penerapan mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Bagian 407 pada Sarbanes Oxley Act (dalam Deviacita dan Tarmizi tahun 2012) menuntut setiap perusahaan untuk mengungkapkan apakah perusahaan memiliki minimal satu orang ahli keuangan dalam komposisi keanggotaan komite auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Irma *et al.* (2015) menggunakan latar belakang pendidikan dari anggota komite audit sebagai salah satu ukuran dalam komite audit yang menjadi variabel dari *corporate governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Variabel proporsi komite audit ahli diukur dengan perbandingan jumlah antara banyaknya anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi terhadap jumlah total banyaknya anggota komite audit. Hasil Penelitian Deviacita dan Tarmizi (2012) menyatakan bahwa faktor *corporate governance* khususnya keahlian komite audit yang diprosikan dengan jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan berpengaruh terhadap *financial distress* yang dialami oleh perusahaan. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa pelanggaran pada bagian keuangan perusahaan tertentu tergantung pada pengalaman dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit. Penelitian Rahmat *et al.* (2009), Anggraini (2010), Kurniasari (2010), dan Pambayun dan Indra (2012) yang menggunakan proksi kompetensi komite audit sebagai salah satu indikator menyatakan bahwa variabel kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress* yang dialami perusahaan. Penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

H₅ : Terdapat pengaruh antara proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan perusahaan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Berdasarkan beberapa penelitian, seperti : penelitian yang dilakukan oleh Nuswandari (2009), Retno dan Denies (2012), serta Oktafian dan Yanuar (2014) menggunakan ukuran perusahaan (*Firm Size*) sebagai salah satu variabel control. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik, maka penelitian ini akan menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol. Untuk mengukur *firm size* perusahaan peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Andrews Owusu pada tahun 2016. *Firm size* didefinisikan sebagai *natural log* dari nilai buku total aset yang dimiliki perusahaan.

Salah satu metode yang populer dan kuat yang berdasarkan pada informasi akuntansi untuk prediksi kebangkrutan sebuah perusahaan adalah metode *Altman Z-Score* yang pertama kali didiskusikan oleh Altman (1968). *Altman Z-Score* telah digunakan sebagai sebuah ukuran yang berkaitan dengan kebangkrutan dalam beberapa penelitian. Piotroski (2000) menggunakan *Altman Z-Score* untuk ukuran *financial distress* yang dialami perusahaan. Elliot *et al.* (2010) menggunakan *Altman Z-Score* untuk mengukur risiko awal perusahaan. Aslan dan Kumar (2012), Becker dan Stromberg (2012) juga menggunakan metode *Altman Z-Score* untuk mengukur *financial distress* dan risiko kebangkrutan. Meskipun model *Altman Z-Score* diperkenalkan sejak akhir tahun 1960an namun hingga sekarang metode tersebut masih digunakan sebagai dasar dalam berbagai penelitian keuangan untuk mengukur

financial distress dan risiko kebangkrutan. Model *Altman Z-Score* mendasarkan pada informasi – informasi keuangan untuk merangkum kinerja secara keseluruhan dan kondisi keuangan perusahaan. Model Altman menggunakan analisis diskriminan untuk mengkombinasikan empat hingga lima rasio menjadi sebuah skor yang menyimbolkan kekuatan keuangan perusahaan dimana digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Untuk variabel risiko kebangkrutan yang bertindak sebagai variabel dependen, penelitian ini menyesuaikan variabel yang digunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Daniel Bryan, Guy Dinesh Fernando, dan Arindam Tripathy pada tahun 2013, yakni menggunakan *Altman Z-Score* sebagai berikut :

$$Z = 1,2(WC) + 1,4(RE) + 3,3(EBIT) + 0,6(MVE) + 0,999(S)$$

Keterangan :

WC = *working capital* dibagi dengan aset total.

RE = laba ditahan dibagi dengan aset total.

EBIT = laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan aset total.

S = penjualan dibagi dengan aset total.

MVE (*market value of equity*) = nilai pasar perusahaan dibagi dengan kewajiban total.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diambil dengan tujuan untuk memperkuat teori yang ada atau bahkan menolak teori yang ada dengan mengidentifikasi hubungan antara variabel – variabel yang ada dalam *corporate governance* dengan risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari berbagai sumber. Penelitian ini akan mengambil sampel perusahaan yang telah *go-public* yang ada dalam laporan *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* selama 5 tahun (tahun 2010 – tahun 2014). Data yang digunakan adalah data dari laporan tahunan dan laporan keuangan untuk mengetahui masing – masing data dari variabel skor CGPI, *board size*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, proporsi komite audit ahli, *firm size*, serta *Altman Z-Score*.

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari masing – masing variabel dependen terhadap variabel independen. Pengujian dilakukan secara masing – masing satu per satu variabel independen terhadap variabel dependen karena apabila dilakukan pengujian seluruh variabel independen secara bersamaan terdapat pelanggaran terhadap asumsi klasik regresi, khususnya terdapat multikolinieritas dan terjadi autokorelasi yang membuat hasil regresi tidak bisa dikatakan bersifat *BLUE (Best Liner Unbiased Estimator)*. Setiap persamaan regresinya dapat dijabarkan sebagai berikut (Sekaran & Bougie 2014):

$$Y = A_0 + A_{1,1}CGPI + A_{2,1}Size + A_{3,1}(CGPI \times Size) + e \quad (3.1)$$

$$Y = A_0 + A_{1,2}BS + A_{2,2}Size + A_{3,2}(BS \times Size) + e \quad (3.2)$$

$$Y = A_0 + A_{1,3}ProKomInd + A_{2,3}Size + A_{3,3}(ProKomInd \times Size) + e \quad (3.3)$$

$$Y = A_0 + A_{1,4}UKA + A_{2,4}Size + A_{3,4}(UKA \times Size) + e \quad (3.4)$$

$$Y = A_0 + A_{1,5}PKAA + A_{2,5}Size + A_{3,5}(PKAA \times Size) + e \quad (3.5)$$

Keterangan :

Y = Risiko Kebangkrutan (*Altman Z-Score*).

A₀ = Konstanta (merupakan nilai Y apabila X = 0)

Size = *Natural Log* (Aset total perusahaan)

A = Koefisien Regresi

CGPI	= skor <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI)
BS	= <i>Board Size</i>
ProKomInd	= Proporsi Komite Independen
UKA	= Ukuran Komite Audit
PKAA	= Proporsi Komite Audit Ahli
e	= galat

Persamaan regresi linier (3.1) dilakukan untuk menganalisis pengaruh skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol. Persamaan regresi linier (3.2) dilakukan untuk menganalisis pengaruh *board size* terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol. Persamaan regresi linier (3.3) dilakukan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol. Persamaan regresi linier (3.4) dilakukan untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol. Persamaan regresi linier (3.5) dilakukan untuk menganalisis pengaruh proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan variabel *firm size* sebagai variabel kontrol.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Priyatno (2014) uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastis pada model regresi. Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Harus terpenuhinya asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan metode grafik. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa titik – titik hasil regresi dari variabel skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), *board size*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan dengan menggunakan *firm size* sebagai variabel kontrol menyebar pada sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 1
Hasil Pengolahan Uji Multikolinieritas

VARIABEL	TOLERANCE	VIF
Skor CGPI	0,433	2,312
Board Size	0,135	7,410
Proporsi Komisaris Independen	0,756	1,322
Ukuran Komite Audit	0,128	7,802
Proporsi Komite Audit Ahli	0,146	6,860

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat diketahui nilai tolerance dari variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, dan variabel 5 sebesar 0,433; 0,135; 0,756; 0,128; dan 0,146. Nilai VIF

dari variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4, dan variabel 5 sebesar 2,312; 7,410; 1,322; 7,802; dan 6,860. Dari nilai tolerance dapat dilihat bahwa nilai-nilai tersebut lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Pengolahan Uji Autokorelasi

VARIABEL	Asymp. Sig. (2-tailed)
Skor CGPI	0,763
Board Size	0,459
Proporsi Komisaris Independen	0,162
Ukuran Komite Audit	0,934
Proporsi Komite Audit Ahli	0,285

Dari Tabel 2 hasil pengolahan uji autokorelasi untuk setiap variabel dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari untuk variabel skor CGPI, *board size*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan proporsi komite audit ahli adalah 0,763; 0,459; 0,162; 0,934; dan 0,285. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat dipastikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 3
Hasil Pengolahan Uji Heteroskedastisitas

VARIABEL	Sig. (2-tailed)
Skor CGPI	0,748
Board Size	0,190
Proporsi Komisaris Independen	0,101
Ukuran Komite Audit	0,084
Proporsi Komite Audit Ahli	0,938

Dari Tabel 3 memperlihatkan nilai signifikansi (Sig. (2-tailed)) untuk variabel skor CGPI, *board size*, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, proporsi komite audit ahli. Nilai untuk masing – masing variabelnya adalah 0,748; 0,190; 0,101; 0,084; dan 0,938. Semua nilai signifikansi untuk setiap variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada setiap variabel.

Hasil pengujian untuk setiap hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh antara skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Tabel 4
 Hasil Analisis Regresi Linier Variabel Skor CGPI Terhadap Risiko Kebangkrutan Yang Dimoderasi oleh Variabel *Firm Size*

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-9,087	4,551		-1,997	0,049
	SkorCGPI	0,381	0,112	0,833	3,395	0,001
	CGPI.FirmSize	-0,008	0,002	-0,845	-3,441	0,001

a. Dependent Variable: RisikoKebangkrutan

Pengujian H_1 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari Skor CGPI bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa Skor CGPI berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan dan nilai signifikansi Skor CGPI.*FirmSize* juga bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *firm size* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh skor CGPI terhadap risiko kebangkrutan. Mengacu Tabel 4 nilai t dari skor CGPI bernilai positif, sehingga dapat diketahui bahwa skor CGPI berpengaruh signifikan positif terhadap risiko kebangkrutan. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa **H_1 didukung, terdapat pengaruh antara skor *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.** Ukuran skor CGPI dalam penelitian ini merupakan ukuran keseluruhan penerapan *corporate governance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Frost *et al.* (2002), Ehikioya (2009), serta Mangena dan Chamisa (2008) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pelaksanaan *corporate governance* terhadap risiko kebangkrutan perusahaan.

H_2 : Terdapat pengaruh antara *board size* terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Tabel 5
 Hasil Analisis Regresi Linier Variabel *Board Size* Terhadap Risiko Kebangkrutan Yang Dimoderasi Oleh Variabel *Firm Size*

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-0,342	1,083		-0,316	0,752
	Board Size	1,906	0,436	2,312	4,370	0,000
	BoardSize.FirmSize	-0,054	0,012	-2,389	-4.515	0,000

a. Dependent Variable: Risiko Kebangkrutan

Pengujian H_2 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari *board size* bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa *board size* berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan dan nilai signifikansi *BoardSize.FirmSize* juga bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *firm size* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh *board size* terhadap risiko kebangkrutan. Mengacu Tabel 5 nilai t dari *board size* bernilai positif, sehingga dapat diketahui bahwa *board size* berpengaruh

signifikan positif terhadap risiko kebangkrutan. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa **H₂ didukung, terdapat pengaruh antara board size terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel firm size.**

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Eisenberg *et al.* (1998) dan Mak dan Kusnadi (2005) yang menemukan pengaruh dari *board size* terhadap risiko kebangkrutan. Guest (2009) dan Garg (2007) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *board size* terhadap kinerja perusahaan, kinerja perusahaan merupakan faktor paling penting yang menentukan risiko kebangkrutan yang ditanggung oleh perusahaan.

H₃ : Terdapat pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Variabel Proporsi Komisaris Independen Terhadap Risiko Kebangkrutan Yang Dimoderasi Oleh Variabel *Firm Size*

		Coefficients ^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6,901	0,993		6,947	0,000
	proporsi komisaris independen (ProKomIn)	-6,039	9,697	-0,235	-0,623	0,534
	ProKomIn.FirmSize	-0,137	0,275	-0,188	-0,499	0,619

a. Dependent Variable: Risiko Kebangkrutan

Pengujian H₃ dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari proporsi komisaris independen bernilai lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan dan nilai signifikansi ProKomIn.FirmSize juga bernilai lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *firm size* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh proporsi komisaris independen terhadap risiko kebangkrutan. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa **H₃ tidak didukung, tidak terdapat pengaruh antara proporsi komisaris independen terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel firm size.** Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Deviacita dan Tarmizi (2012), Hanifah (2013), dan Setiawan *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *corporate governance* yang diukur dengan proporsi komisaris independen terhadap financial distress yang diukur dengan Altman's Z-Score.

H₄ : Terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Tabel 7
 Hasil Analisis Regresi Linier Variabel Ukuran Komite Audit Terhadap Risiko Kebangkrutan
 Yang Dimoderasi Oleh Variabel *Firm Size*

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,712	0,882		3,076	0,002
	Ukuran Komite Audit (UkKomAud)	2,343	1,207	1,030	1,941	0,054
	UkKomAud.FirmSize	-0,079	0,035	-1,204	-2,270	0,025

a. Dependent Variable: Risiko Kebangkrutan

Pengujian H_4 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ukuran komite audit bernilai lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan, namun nilai signifikansi $UkKomAud.FirmSize$ bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *firm size* memperkuat pengaruh ukuran komite audit terhadap risiko kebangkrutan. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peneliti mendapatkan hasil bahwa **H_4 tidak didukung, tidak terdapat pengaruh antara ukuran komite audit terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.**

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Widyati (2013) yang menyatakan bahwa komite audit yang diukur dengan menggunakan jumlah komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu faktor penting penentu risiko kebangkrutan perusahaan. Penelitian Rahmat *et al.* (2009) dan Nuresa dan Basuki (2013) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress* perusahaan yang diukur dengan Altman's *Z-Score*.

H_5 : Terdapat pengaruh antara proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.

Tabel 8

Hasil Analisis Regresi Linier Variabel Proporsi Komite Audit Ahli Terhadap Risiko
 Kebangkrutan Yang Dimoderasi Oleh Variabel *Firm Size*

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2,969	0,886		3,352	0,001
	Proporsi Komite Audit Ahli (ProKomAudAhli)	10,643	4,739	0,765	2,246	0,026
	ProKomAudAhli.FirmSize	-0,374	0,145	-0,881	-2,587	0,011

a. Dependent Variable: Risiko Kebangkrutan

Pengujian H_5 dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier. Hasil uji t yang dilakukan oleh peneliti pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari proporsi komite audit ahli bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa proporsi komite audit ahli berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan dan nilai signifikansi ProKomAudAhli.FirmSize juga bernilai lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *firm size* tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan. Mengacu Tabel 8 nilai t dari proporsi komite audit ahli bernilai positif, sehingga dapat diketahui bahwa proporsi komite audit ahli berpengaruh signifikan positif terhadap risiko kebangkrutan. Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peneliti mendapatkan hasil bahwa **H_5 didukung, terdapat pengaruh antara proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan yang dimoderasi oleh variabel *firm size*.**

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh McMullen dan Raghunandan (1996), Rahmat *et al.* (2009), Anggraini (2010), Kurniasari (2010), Pambayun dan Indra (2012) dan Deviacita dan Tarmizi (2012) yang menemukan pengaruh antara proporsi komite audit ahli terhadap risiko kebangkrutan perusahaan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 22, didapatkan hasil bahwa variabel dari penerapan *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian khususnya skor *Corporate Governance Perception Index* (CGPI), *board size*, dan proporsi komite audit ahli yang dimoderasi oleh variabel *firm size* berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan perusahaan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Hasil temuan yang lain dalam penelitian ini adalah variabel dari penerapan *corporate governance* yang lain, yakni : proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit yang dimoderasi oleh variabel *firm size* tidak berpengaruh terhadap risiko kebangkrutan perusahaan.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel dan sampel yang lebih banyak dari *corporate governance* agar memperkaya ilmu pengetahuan tentang *corporate governance*. Penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan proksi lain selain Altman Z-Score sebagai variabel risiko kebangkrutan perusahaan.

Daftar Pustaka

- Altman, E.I. (1968), "Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy", *The Journal of Finance*, Vol. 23 No. 4, pp. 589-609.
- Anderson, R., Mansi, S. dan Reeb, D. (2004), "Board characteristics, accounting report integrity and the cost of debt". *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37 No. 3, pp. 315-42.
- Anggraini, T. V. 2010. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Aslan, H. dan Kumar, P. (2012), "Strategic ownership structure and the cost of debt". *Review of Financial Studies*, Vol. 25 No. 7, pp. 2257-2299.
- Becker, B. dan Stromberg, P. (2012), "Fiduciary duties and equity-debt holder conflicts". *Review of Financial Studies*, Vol. 25 No. 6, pp. 1931-1969.
- Bryan, D. Guy Dinesh F. dan Arindam T. 2013. Bankruptcy risk, productivity and firm strategy. *Review of Accounting and Finance*, Vol 12. No.4. pp.309-326.
- Deviacita, A.W. dan Tarmizi, A. 2012. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1 No. 1 pp. 1-14.
- Ehikioya, B.I. (2009), "Corporate governance structure and firm performance in developing economies, Evidence from Nigeria". *Corporate Governance*, Vol. 9, No. 3, pp. 231-243.
- Eisenberg, T., Sundgren, S. dan Wells, M. (1998), "Larger board size and decreasing firm value in small firms". *Journal of Financial Economics*, Vol. 48, No. 1, pp. 35-54.
- Elliott, J.A., Ghosh, A. dan Moon, D. (2010), "Asymmetric valuation of sustained growth by bond and equity-holders". *Review of Accounting Studies*, Vol. 15, No. 4, pp. 833-878.
- Frost, C.A., Gordon, E.A. dan Hayes, A.F. (2002), "Stock exchange disclosure and market liquidity: an analysis of 50 international exchanges". *paper presented at the World Federation of Exchanges' Forum on Managing Exchanges in Emerging Economics*, Kuala Lumpur.
- Garg, A. K. (2007). Influence of Board Size and Independence on Firm Performance: A Study of Indian Companies. *Research*, 32(3), pp. 39-60.
- Ghazali, N.A.M. (2010). "Ownership Structure, Corporate Governance and Corporate Performance in Malaysia". *International Journal of Commerce and Management*. Vol. 20 No.2, pp. 109-119.
- Gil, A. dan Obradovich, J. 2012. The Impact of Corporate Governance and Financial Leverage on the Value of American Firms. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 91 (2012), 46-56.
- Guest, P. M. (2009). The impact of board size on firm performance: Evidence from the UK. *The European Journal of Finance*. 15(4), 385-404.
- Hanifah, Oktita Earning, 2013. Pengaruh Struktur Corporate Governance dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* vol. 2, no 2, p.1-15. ISSN 2337-3806
- Hapsoro, D. 2008. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol. 19, No. 3, Desember 2008.
- Huang, H., Jing-jing, Zhao. 2008. Relationship Between Corporate Governance and Financial Distress: An Empirical Study of Distressed Companies in China. *International Journal of Management*.

- Hussainey, K. dan Aljifri, K. 2012. "Corporate Governance Mechanisms and Capital Structure in UAE". *Journal of Applied Accounting Research*. Vol. 13 No. 2. pp. 145-160.
- Irma, Yeni, Noorina, dan H. A. Muktiyanto. 2015. The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism To Firm's Performance (Empirical Study Of Manufacturing Firms Listed On IDX). *IJABER*. Vol. 13 No. 7. pp. 4849-4866.
- Kurniasari, N. T. 2010. Pengaruh Struktur Corporate Governance, Agency Cost dan Opini Going Concern Terhadap Kondisi Financial Distress (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mak, Y. dan Kusnadi, Y. (2005), "Size really matters: further evidence on the negative relationship between board size and firm value", *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol. 13 No. 3, pp. 201-318.
- Mangena, M. dan Chamisa, E. (2008), "Corporate governance and incidences of listing suspension by the JSE Securities Exchange of South Africa: an empirical analysis". *The International Journal of Accounting*, Vol. 43 No. 1, pp. 28-44.
- McMullen, D.A., dan Raghunandan, K. 1996. Enhancing Audit Committee Effectiveness. *Journal of Accountancy*, pp. 79-81.
- Nuresa, A. dan Basuki, H. 2013. Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No.2, pp. 1-10.
- Nuswandari, C. 2009. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Vol. 16, No.2. pp. 70-84.
- Oktafian, M.T.Y. dan Yanuar S.P. 2014. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Return on Equity Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Pada 14 Perusahaan Go Public Yang Menduduki Peringkat CGPI Tahun 2010 – 2012). *Among Makarti*, Vol.7 No.14. pp.65-78
- Owusu, A. 2016. What Drives Corporate Governance Quality in Emerging African Economies? Evidence From Ghana. *The Journal of Developing Areas*, Vol. 50. No. 4.
- Pathan, Shams, Skully, Michael T., dan Wickramanayake, J. 2007. Board Size, Independence and Performance: An Analysis of Thai Banks. *Asia-Pacific Financial Markets*, Vol. 14 No. 3, pp. 211-227, School of Business, Bond University, Monash University – Department of Accounting and Finance.
- Pembayun, A. G. dan Indra, J. 2012. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* 1 (1):1-15.
- Priyatno, D. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Andi. Yogyakarta.
- Raharja, R.S.P. 2014. Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting* 3 (3):1-13.
- Rahmat, M.M., Takiah, M.I, dan Norman, M.S. 2009. " Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and non- Distressed Companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 7 pp. 624-638.
- Retno, R.D. dan Denies P. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). *Jurnal Nominal*. Vol. 1 No. 1.
- Romano, Giulia. *et al.* 2012. Corporate Governance and Performance in Italian Banking Groups. *Paper to be Presented at the International Conference "Corporate Governance and Regulation: Outlining New Horizons for Theory and Practice"*. Pisa, Italy, Sept 19, 2012.

- Sam'ani. 2010. Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2004 – 2007. Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
- Setiawan, A., Edi, S. dan Sri, F. 2016. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010 – 2014). *Prosiding Akuntansi*. Vol.2, No.1. pp. 285-292.
- Sukamulja, S. 2003. Penerapan Good Corporate Governance di Sektor Keuangan Indonesia : Dampak GCG terhadap Kinerja. Forum Diskusi Ekonomi Putaran I Tahun 2003.
- Triwahyuningtias, M. dan Muharam, H. 2012. Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Dewan, Komisaris Independen, Likuiditas, dan Leverage Terhadap Terjadinya Kondisi Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 – 2010). *Diponegoro Journal of Management* 1 (1):1-14.
- Ujiyantho, M.A. dan Bambang A.P. 2007. Mekanisme *Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Wardhani, R. 2007. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 4(1) : 95-114.
- Widyati, M.F. 2013. Pengaruh Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*. Vol. 1, No. 1, pp. 234-249.
- Xie, Biao, Wallace, N.D., Peter, J.DaDalt. 2003. Earnings Management and Corporate Governance: the role of the board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance* 9: 295-316.
- <http://www.iicg.org/>
- <http://www.fcgi.or.id>
- <http://www.investinganswers.com>
- <http://muc-advisory.com/tag/komite-nasional-kebijakan-governance-knkg/> (online) diakses pada Rabu 28 September 2016 pada pukul 14:07